DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Ainul Yaqin dkk, *Membangun Aksi Demokrasi*, Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi, 2007.

Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Bagir Manan dan Kuantara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.

Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001.

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Nusamedia, 2007.

Georg Shorensen, *Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang berubah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus Media, 2009.

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Indra Piliang, *Menggagas Format Ideal Hubungan Presiden dan DPR*, Jakarta: CSIS, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008.

Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. kedua, Jakarta: PT.Rineka citra, 2003.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* , Gama Media , Yogyakarta, 1999.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD,* Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan dan Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia,* BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2010.

Teuku May Rudi, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Data Elektronik

http://jogja.antaranews.com/berita/333392/bawaslu-diy--pilkada-sleman-paling-rawan-pelanggaran, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/panwas-sleman-temukan-dugaan-politik-uang, di akses 3 Januari 2017

http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu, diakses pada tanggal 30 Januari 2017.

Lain-lain

Data penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Panwas Kabupaten Sleman, *Laporan Akhir Kinerja Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2015*, hlm 123-145.

Wawancara penulis dengan pihak Bawaslu DIY, yaitu ibu Sri Wardiningsih, S.H., pada tanggal 13 Februari 2017.